



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 011 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN

KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran Pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda Nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Operasional Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun...

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dinas Pengelolaan ...

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional khusus;
6. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran;
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian kedua

Maksud dan Tujuan Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS Pasal 4

- 1) Tanda Nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas; dan
 - b. kendaraan dinas operasional.
- 2) Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang...

Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), Nomor Polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf P dan PZ) dan berbentuk plat alumunium berwarna – warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih;

- 3) Apabila kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (3) diganti, maka tetap menggunakan nomor polisi kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- 4) Urutan pemberian tanda nomor polisi kendaraan dinas Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor kendaraan dinas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) Dilaksanakan oleh BPKAD.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda Nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perubahan nomor polisi kendaraan dinas jabatannya kepada Bupati melalui kepala BPKAD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor polisi kendaraan dilaksanakan paling lama 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati

Pasal 9..

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal **06 Maret** 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada Tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 06-03-2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

d.t.o

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal 13-03-2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR 011

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 06-03-2017

BUPATI
 **- PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR** 

dto

 **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi

Pada Tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 011 /KPTS/DISHUBKOMINFO/2017
TANGGAL : 06 Maret 2017

NAMA INSTANSI		JABATAN		NOMOR POLISI	
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 1 P	
	2	WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 2 P	
	3	KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 3 P	
	4	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 4 P	
	5	KETUA PENGADILAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 5 P	
	6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 6 PZ	
	7	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 7 PZ	
	8	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 8 PZ	
	9	WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 9 PZ	
DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PENUKAL ABAB LETANG ILIR		BG 10 PZ	
PENGADILAN AGAMA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1			BG 11 PZ	
	2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		BG 12 PZ	
	3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		BG 13 PZ	
	4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		BG 14 PZ	
	5	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN		BG 15 PZ	
	6	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN		BG 16 PZ	
	7	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM		BG 17 PZ	
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	SEKRETARIS		BG 18 PZ	
	2	KEPALA BAGIAN UMUM			BG 181 PZ
	3	KEPALA BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUK HUKUM			BG 182 PZ
	4	KEPALA BAGIAN KEUANGAN			BG 183 PZ
1. SEKRETARIAT DEWAN	1	INSPEKTUR		BG 19 PZ	
	2	SEKRETARIS			BG 191 PZ
	3	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I			BG 192 PZ
	4	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II			BG 193 PZ
2. INSPEKTORAT					

NAMA INSTANSI		JABATAN		NOMOR POLISI	
3. BAPEDA	1	KEPALA BADAN	BG 20 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 201 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		BG 202 PZ	
	4	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL, BUDAYA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BG 203 PZ	
	5	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, SDA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BG 204 PZ	
4. BKSDM	1	KEPALA BADAN	BG 21 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 211 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAAN, MUTASI DAN PROMOSI		BG 212 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		BG 213 PZ	
5. BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 22 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 221 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH		BG 222 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PBB, BPHTB, DAN RETRIBUSI		BG 223 PZ	
	5	KEPALA BIDANG PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA		BG 224 PZ	
6. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 23 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 231 PZ	
	3	KEPALA BIDANG ANGARAN		BG 232 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN		BG 233 PZ	
	5	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH		BG 234 PZ	
7. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	KEPALA BADAN	BG 24 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 241 PZ	
	3	KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN		BG 242 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI		BG 243 PZ	
8. BADAN KESBANG POL	1	KEPALA BADAN	BG 25 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 251 PZ	
	3	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA		BG 252 PZ	
	4	KEPALA BIDANG FASILITAS ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN		BG 253 PZ	
	5	KEPALA BIDANG PARTISIPASI POLITIK		BG 254 PZ	

NAMA INSTANSI		JABATAN		NOMOR POLISI	
9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 26 PZ		
	2	SEKRETARIS BADAN		BG 261 PZ	
	3	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		BG 262 PZ	
	4	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BG 263 PZ	
	5	BIDANG REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI		BG 264 PZ	
10. DINAS PERHUBUNGAN	1	KEPALA DINAS	BG 27 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 271 PZ	
	3	KEPALA BID. LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PENGUJIAN		BG 272 PZ	
	4	KEPALA BID. PRASARANA, KESELAMATAN, DAN PENGEMBANGAN		BG 273 PZ	
11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	KEPALA DINAS	BG 28 PZ		
	2	SEKREARTRIS		BG 281 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		BG 282 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN		BG 283 PZ	
	5	KEPALA BIDANG TRANSMIGRAN		BG 284 PZ	
	1	KEPALA DINAS	BG 29 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 291 PZ	
	3	KEPALA BID. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		BG 292 PZ	
12. DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	KEPALA BID. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		BG 293 PZ	
	5	KEPALA BID. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		BG 294 PZ	
	6	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		BG 295 PZ	
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	KEPALA DINAS	BG 30 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 301 PZ	
	3	KEPALA BID. LINGKUNGAN HIDUP		BG 302 PZ	
	4	KEPALA BID. PERTAMAMAMANAN DAN SUMBER DAYA ALAM		BG 303 PZ	
	1	KEPALA DINAS	BG 31 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 311 PZ	
	3	KEPALA BID. PROGRAM		BG 312 PZ	
	4	KEPALA BID. BINA MARGA		BG 313 PZ	
14. DINAS PEKERJAAN UMUM	5	KEPALA BID. SUMBER DAYA AIR		BG 314 PZ	
	6	KEPALA BID. PEMBINAAN TEKNIK DAN PERALATAN		BG 315 PZ	

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	KEPALA DINAS	BG 32 PZ	BG 321 PZ
	2	SEKRETARIS		BG 322 PZ
	3	KEPALA BID. PERUMAHAN		BG 323 PZ
	4	KEPALA BID. KAWASAN PERMUKIMAN		BG 324 PZ
	5	KEPALA BID. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		BG 325 PZ
	6	KEPALA BID. TATA RUANG		
16. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	KEPALA DINAS	BG 33 PZ	BG 331 PZ
	2	SEKRETARIS		BG 332 PZ
	3	KEPALA BID. KEPEMUDAAN		BG 333 PZ
	4	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN OLAHRAGA		BG 334 PZ
	5	KEPALA BID. PENINGKATAN PRESTASI		
	6	KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA		
17. DINAS KESEHATAN	1	KEPALA DINAS	BG 34 PZ	BG 341 PZ
	2	SEKRETARIS		BG 342 PZ
	3	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		BG 343 PZ
	4	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGEDALIAN PENYAKIT		BG 344 PZ
	5	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN		
18. DINAS KOPERASI DAN UKM	1	KEPALA DINAS	BG 35 PZ	BG 351 PZ
	2	SEKRETARIS		BG 352 PZ
	3	KEPALA BID. KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN		BG 353 PZ
	4	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
19. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	KEPALA DINAS	BG 36 PZ	BG 361 PZ
	2	SEKRETARIS		BG 362 PZ
	3	KEPALA BID. PERDAGANGAN		BG 363 PZ
	4	KEPALA BID. PERINDUSTRIAN		
20. DINAS SATUAN POL. PP	1	KEPALA SATUAN	BG 37 PZ	BG 371 PZ
	2	KEPALA BID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN		BG 372 PZ
	3	KEPALA BID. PENEGAKAN PERDA		BG 373 PZ
	4	KEPALA BID. PEMBINAAN SATLINMAS		
21. DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KETUA BADAN KEHORMATAN	BG 38 PZ	
	2	KETUA KOMISI I	BG 39 PZ	
	3	KETUA KOMISI II	BG 40 PZ	
	4	KETUA KOMISI III	BG 41 PZ	
	5	KETUA BADAN ANGGARAN	BG 42 PZ	
	6	KETUA BADAN MUSYAWARAH	BG 43 PZ	
	7	KETUA BADAN LEGISLASI	BG 44 PZ	

22. DINAS KETAHANAN PANGAN	1	KEPALA DINAS	BG 45 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 451 PZ
	3	KEPALA BID. KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN		BG 452 PZ
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN		BG 453 PZ
23. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	KEPALA DINAS	BG 46 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 461 PZ
	3	KEPALA BID. PERPUSTAKAAN		BG 462 PZ
	4	KEPALA BID. KEARSIPAN		BG 463 PZ
	5	KEPALA BID. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		BG 464 PZ
24. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	KEPALA DINAS	BG 47 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 471 PZ
	3	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN		BG 472 PZ
	4	KEPALA BIDANG PARIWISATA DAN PROMOSI		BG 473 PZ
25. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	KEPALA DINAS	BG 48 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 481 PZ
	3	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		BG 482PZ
	4	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		BG 483PZ
26. DINAS PERTANIAN	1	KEPALA DINAS	BG 49 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 491 PZ
	3	KEPALA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		BG 492 PZ
	4	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA		BG 493 PZ
	5	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN		BG 494 PZ
27. DINAS PERIKANAN	1	KEPALA DINAS	BG 50 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 501 PZ
	3	KEPALA BIDANG PETERNAKAN		BG 502 PZ
	4	KEPALA BIDANG PERIKANAN		BG 503 PZ
28. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	1	KEPALA DINAS	BG 51 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 511 PZ
	3	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKAN PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN		BG 512 PZ
	4	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA		BG 513 PZ
	5	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		BG 514 PZ
	6	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		BG 515 PZ

29. DINAS PENDIDIKAN	1	KEPALA DINAS	BG 52 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 521 PZ
	3	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR		BG 522 PZ
	4	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL		BG 523 PZ
	5	KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN		BG 524 PZ
30. DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN	1	KEPALA DINAS	BG 53 PZ	
	2	SEKRETARIS DINAS		BG 531 PZ
	3	BIDANG INFEKSIM, PENYELAMATAN KEBAKARAN		BG 532 PZ
31. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	1	KEPALA KANTOR	BG 54 PZ	
32. RSUD TALANG UBI	1	DIREKTUR	BG 55 PZ	
33. KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KETUA KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 56 PZ	
	2	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 561 PZ
34. BPN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KEPALA KANTOR BPN KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 57 PZ	
35. BIRO PUSAT STATISTIK	1	KEPALA KANTOR BPS KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 58 PZ	
36. SEKRETARIAT KORPRI	1	SEKRETARIS	BG 59 PZ	
37. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KEPALA BAGIAN PEMERINTAH UMUM	BG 60 PZ	
	2	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BG 61 PZ	
	3	KEPALA BAGIAN HUKUM	BG 62 PZ	
	4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BG 63 PZ	
	5	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	BG 64 PZ	
	6	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	BG 65 PZ	
	7	KEPALA BAGIAN UMUM	BG 66 PZ	
	8	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	BG 67 PZ	
	9	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	BG 68 PZ	
	10	KEPALA BAGIAN HUMAS	BG 69 PZ	
	11	KEPALA BAGIAN PROTOKOL	BG 70 PZ	
38. KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	CAMAT TALANG UBI	BG 71 PZ	
	2	CAMAT PENUKAL	BG 72 PZ	
	3	CAMAT ABAB	BG 73 PZ	
	4	CAMAT TANAH ABANG	BG 74 PZ	
	5	CAMAT PENUKAL UTARA	BG 75 PZ	
39. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	KEPALA DINAS	BG 81 PZ	
	2	SEKRETARIS	BG 82 PZ	
	3	BID. PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM,	BG 83 PZ	
	4	BID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	BG 84 PZ	
	5	BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	BG 85 PZ	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : /KPTS/DISHUBKOMINFO/2017
TANGGAL : 2017

NAMA INSTANSI	JABATAN	NOMOR POLISI
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 1 P
	2 WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 2 P
	3 KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 3 P
	4 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 4 P
	5 KETUA PENGADILAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 5 P
	6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 6 PZ
	7 WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 7 PZ
	8 WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 8 PZ
	9 WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 9 PZ
DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PENUKAL ABAB LETANG ILIR	BG 10 PZ
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	BG 11 PZ
	2 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BG 12 PZ
	3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	BG 13 PZ
	4 STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	BG 14 PZ
	5 STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	BG 15 PZ
	6 STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	BG 16 PZ
	7	BG 17 PZ
1. SEKRETARIAT DEWAN	1 SEKRETARIS	BG 18 PZ
	2 KEPALA BAGIAN UMUM	BG 191 PZ
	3 KEPALA BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUK HUKUM	BG 192 PZ
	4 KEPALA BAGIAN KEUANGAN	BG 193 PZ
2. INSPEKTORAT	1 INSPEKTUR	BG 19 PZ
	2 SEKRETARIS	BG 194 PZ
	3 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	BG 195 PZ
	4 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	BG 196 PZ

NAMA INSTANSI		JABATAN		NOMOR POLISI	
3. BAPPEDA	1	KEPALA BADAN	BG 20 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 201 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		BG 202 PZ	
	4	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL, BUDAYA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		BG 203 PZ	
	5	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, SDA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH		BG 204 PZ	
4. BKSDM	1	KEPALA BADAN	BG 21 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 211 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAAN, MUTASI DAN PROMOSI		BG 212 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN		BG 213 PZ	
5. BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 22 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 221 PZ	
	3	KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH		BG 222 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PBB, BPHTB, DAN RETRIBUSI		BG 223 PZ	
	5	KEPALA BIDANG PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA		BG 224 PZ	
6. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	KEPALA BADAN	BG 23 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 231 PZ	
	3	KEPALA BIDANG ANGGARAN		BG 232 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN		BG 233 PZ	
	5	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH		BG 234 PZ	
7. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	KEPALA BADAN	BG 24 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 241 PZ	
	3	KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI, DAN PEMERINTAHAN		BG 242 PZ	
	4	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI		BG 243 PZ	
8. BADAN KESBANG POL	1	KEPALA BADAN	BG 25 PZ		
	2	SEKRETARIS		BG 251 PZ	
	3	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA		BG 252 PZ	
	4	KEPALA BIDANG FASILITAS ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN KEMASYARAKATAN		BG 253 PZ	
	5	KEPALA BIDANG PARTISIPASI POLITIK		BG 254 PZ	

NAMA INSTANSI	JABATAN	NOMOR POLISI	
9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 KEPALA BADAN	BG 26 PZ	
	2 SEKRETARIS BADAN		BG 261 PZ
	3 BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		BG 262 PZ
	4 BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BG 263 PZ
	5 BIDANG REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI		BG 264 PZ
10. DINAS PERHUBUNGAN	1 KEPALA DINAS	BG 27 PZ	
	2 SEKRETARIS		BG 271 PZ
	3 KEPALA BID. LALU LINTAS, ANGKUTAN DAN PENGUJIAN		BG 272 PZ
	4 KEPALA BID. PRASARANA, KESELAMATAN, DAN PENGEMBANGAN		BG 273 PZ
	1 KEPALA DINAS	BG 28 PZ	
	2 SEKREATRIS		BG 281 PZ
	3 KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		BG 282 PZ
11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	4 KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN		BG 283 PZ
	5 KEPALA BIDANG TRANSMIGRAN		BG 284 PZ
	1 KEPALA DINAS	BG 29 PZ	
	2 SEKRETARIS		BG 291 PZ
12. DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3 KEPALA BID. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		BG 292 PZ
	4 KEPALA BID. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		BG 293 PZ
	5 KEPALA BID. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		BG 294 PZ
	6 KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN		BG 295 PZ
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 KEPALA DINAS	BG 30 PZ	
	2 SEKRETARIS		BG 301 PZ
	3 KEPALA BID. LINGKUNGAN HIDUP		BG 302 PZ
	4 KEPALA BID. PERTAMAMANAN DAN SUMBER DAYA ALAM		BG 303 PZ
14. DINAS PEKERJAAN UMUM	1 KEPALA DINAS	BG 31 PZ	
	2 SEKRETARIS		BG 311 PZ
	3 KEPALA BID. PROGRAM		BG 312 PZ
	4 KEPALA BID. BINA MARGA		BG 313 PZ
	5 KEPALA BID. SUMBER DAYA AIR		BG 314 PZ
	6 KEPALA BID. PEMBINAAN TEKNIK DAN PERALATAN		BG 315 PZ

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	KEPALA DINAS	BG 32 PZ	BG 321 PZ
	2	SEKRETARIS		BG 322 PZ
	3	KEPALA BID. PERUMAHAN		BG 323 PZ
	4	KEPALA BID. KAWASAN PERMUKIMAN		BG 324 PZ
	5	KEPALA BID. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		BG 325 PZ
	6	KEPALA BID. TATA RUANG		
16. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	KEPALA DINAS	BG 33 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 331 PZ
	3	KEPALA BID. KEPEMUDAAN		BG 332 PZ
	4	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN OLAHRAGA		BG 333 PZ
	5	KEPALA BID. PENINGKATAN PRESTASI		BG 334 PZ
	6	KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA		
17. DINAS KESEHATAN	1	KEPALA DINAS	BG 34 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 341 PZ
	3	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		BG 342 PZ
	4	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGEDALIAN PENYAKIT		BG 343 PZ
	5	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN		BG 344 PZ
	1	KEPALA DINAS	BG 35 PZ	
18. DINAS KOPERASI DAN UKM	2	SEKRETARIS		BG 351 PZ
	3	KEPALA BID. KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN		BG 352 PZ
	4	KEPALA BID. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO		BG 353 PZ
	1	KEPALA DINAS	BG 36 PZ	
19. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2	SEKRETARIS		BG 361 PZ
	3	KEPALA BID. PERDAGANGAN		BG 362 PZ
	4	KEPALA BID. PERINDUSTRIAN		BG 363 PZ
	1	KEPALA SATUAN	BG 37 PZ	
20. DINAS SATUAN POL PP	2	KEPALA BID. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN		BG 371 PZ
	3	KEPALA BID. PENEGAKAN PERDA		BG 372 PZ
	4	KEPALA BID. PEMBINAAN SATLINMAS		BG 373 PZ
	1	KETUA BADAN KEHORMATAN	BG 38 PZ	
21. DPRD KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2	KETUA KOMISI I	BG 39 PZ	
	3	KETUA KOMISI II	BG 40 PZ	
	4	KETUA KOMISI III	BG 41 PZ	
	5	KETUA BADAN ANGGARAN	BG 42 PZ	
	6	KETUA BADAN MUSYAWARAH	BG 43 PZ	
	7	KETUA BADAN LEGISLASI	BG 44 PZ	

22. DINAS KETAHANAN PANGAN	1	KEPALA DINAS	BG 45 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 451 PZ
	3	KEPALA BID. KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN		BG 452 PZ
	4	KEPALA BID. PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN		BG 453 PZ
23. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	KEPALA DINAS	BG 46 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 461 PZ
	3	KEPALA BID. PERPUSTAKAAN		BG 472 PZ
	4	KEPALA BID. KEARSIPAN		BG 473 PZ
	5	KEPALA BID. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		BG 474 PZ
24. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	KEPALA DINAS	BG 47 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 471 PZ
	3	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN		BG 472 PZ
	4	KEPALA BIDANG PARIWISATA DAN PROMOSI		BG 473 PZ
25. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	KEPALA DINAS	BG 48 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 481 PZ
	3	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		BG 482PZ
	4	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		BG 483PZ
26. DINAS PERTANIAN	1	KEPALA DINAS	BG 49 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 491 PZ
	3	KEPALA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		BG 492 PZ
	4	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA		BG 493 PZ
27. DINAS PERIKANAN	5	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN		BG 494 PZ
	1	KEPALA DINAS	BG 50 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 431 PZ
	3	KEPALA BIDANG PETERNAKAN		BG 432 PZ
28. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	4	KEPALA BIDANG PERIKANAN		BG 433 PZ
	1	KEPALA DINAS	BG 51 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 501 PZ
	3	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKAN PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN		BG 502 PZ
	4	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA		BG 503 PZ
	5	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		BG 504 PZ
28. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	6	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		BG 505 PZ

29. DINAS PENDIDIKAN	1	KEPALA DINAS	BG 52 PZ	
	2	SEKRETARIS		BG 521 PZ
	3	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR		BG 522 PZ
	4	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL		BG 533 PZ
	5	KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN		BG 534 PZ
30. DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN	1	KEPALA DINAS	BG 53 PZ	
	2	SEKRETARIS DINAS		BG 531 PZ
	3	BIDANG INFEKSIM, PENYELAMATAN KEBAKARAN		BG 532 PZ
31. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	1	KEPALA KANTOR	BG 54 PZ	
32. RSUD TALANG UBI	1	DIREKTUR	BG 55 PZ	
33. KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KETUA KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 56 PZ	
	2	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		BG 561 PZ
34. BPN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KEPALA KANTOR BPN KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 57 PZ	
35. BIRO PUSAT STATISTIK	1	KEPALA KANTOR BPS KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	BG 58 PZ	
36. SEKRETARIAT KORPRI	1	SEKRETARIS	BG 59 PZ	
37. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	KEPALA BAGIAN PEMERINTAH UMUM	BG 60 PZ	
	2	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BG 61 PZ	
	3	KEPALA BAGIAN HUKUM	BG 62 PZ	
	4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	BG 63 PZ	
	5	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	BG 64 PZ	
	6	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN	BG 65 PZ	
	7	KEPALA BAGIAN UMUM	BG 66 PZ	
	8	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	BG 67 PZ	
	9	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	BG 68 PZ	
	10	KEPALA BAGIAN HUMAS	BG 69 PZ	
	11	KEPALA BAGIAN PROTOKOL	BG 70 PZ	
38. KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1	CAMAT TALANG UBI	BG 71 PZ	
	2	CAMAT PENUKAL	BG 72 PZ	
	3	CAMAT ABAB	BG 73 PZ	
	4	CAMAT TANAH ABANG	BG 74 PZ	
	5	CAMAT PENUKAL UTARA	BG 75 PZ	

NAMA INSTANSI		JABATAN	NOMOR POLISI	
CADANGAN			BG 76 PZ	BG 76 PZ
CADANGAN			BG 77 PZ	BG 77 PZ
CADANGAN			BG 78 PZ	BG 78 PZ
CADANGAN			BG 79 PZ	BG 79 PZ
CADANGAN			BG 80 PZ	BG 80 PZ

BUPATI
.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto


HERI AMALINDO